

PENGARUH BELANJA PENDIDIKAN, BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (STUDI PADA 22 KABUPATEN/KOTA DI NTT)

Stefanus Paulus Ratuludji¹⁾, Preseveranda²⁾, Stanis Man²⁾

^{1,2,3}Universitas Katholik Widya Mandira

E-mail: stefanuspaulusratuludji@gmail.com

Abstract

This research aims to (1) determine the effect of education spending on the Human Development Index during the Covid-19 pandemic in East Nusa Tenggara Province; (2) determine the influence of health spending on the Human Development Index during the Covid-19 pandemic in East Nusa Tenggara Province; and (3) determine the effect of infrastructure spending on the Human Development Index during the Covid-19 pandemic in East Nusa Tenggara Province. The scope of this research is an analysis of the influence of government spending on education, health and infrastructure spending on the Human Development Index during the Covid-19 period in districts/cities in East Nusa Tenggara Province. The data analysis technique used in this research is panel data regression analysis using the Fixed Effect Model (FEM). The results of this research show that (1) partially education spending has a positive and significant effect on the human development index, partially health spending has a positive and significant effect on the index human development, partially infrastructure spending has a negative and significant effect on the human development index; (2) Simultaneously education spending, health spending and infrastructure spending have an effect on the human development index; and (3) the results of the determinant coefficient test (R²) show education spending, Health spending and infrastructure spending have an influence on increasing the human development index.

Keywords: Education spending, health spending, infrastructure spending, HDI

1. PENDAHULUAN

Sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui UU No. 22 dan 25 tahun 1999 serta diperbaharui melalui UU 32 dan 33 Tahun 2004, pemerintah daerah memiliki peran yang semakin besar dalam pembangunan di daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan yang tepat, terutama bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur (Negara, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kuantitatif yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Izzah, 2021). Pandemi COVID 19 telah menyebabkan berbagai masalah pembangunan di seluruh dunia. Indeks pembangunan manusia sendiri menjadi tolak ukur perkembangan dan pembangunan suatu negara selain dari pengukuran pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Secara garis besar terdapat tiga hal pokok yang menjadi dasar perhitungan Indeks Pembangunan manusia, yaitu tingkat kesehatan dan lama hidup, tingkat pendidikan, dan kelayakan standar hidup masyarakat (Ningrum, 2020).

Menurut Kuncoro, yang menjadi fokus utama dalam pembangunan adalah peningkatan kualitas manusia (Raharti, 2020). Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengoptimalkan sumber daya yang diperoleh untuk merencanakan target-target capaian kinerja dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan belanja modal untuk memberi pelayanan. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak akan lepas dari peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber- sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk sektor-sektor yang dapat menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Istianto, 2021).

Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas pada suatu daerah atau negara tersebut (Janah, 2022).

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya masih terbilang sangat tinggi mencapai lebih dari 20 persen warga di Nusa Tenggara Timur mengalami masalah kemiskinan. Kondisi sebagian besar alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga NTT hampir setiap tahun. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang kurang memadai pada akhirnya menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu (Nalle, 2018).

Penekanan terhadap akses, kualitas dan kuantitas fasilitas, sarana, pelayanan dan sumber daya selanjutnya merujuk pada peran pemerintah daerah Provinsi NTT melalui kebijakan fiskal pendapatan dan belanja daerah. Secara khusus terhadap kebijakan pengeluaran daerah melalui belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur. Belanja pendidikan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Belanja kesehatan merupakan jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Belanja Infrastruktur adalah belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah (Zaenuddin, 2018).

Provinsi Nusa Tenggara Timur secara administratif terbagi menjadi 21 kabupaten dan 1 kota, dengan banyaknya jumlah kabupaten/kota tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. Selain masalah kemiskinan, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam wilayah dengan IPM terendah di Indonesia. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Nusa Tenggara Timur menempati peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai IPM 63,13. yang artinya Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai IPM terendah ke-3 di Indonesia setelah Provinsi Papua (60,62), Papua Barat (65,26). Maka berdasarkan klasifikasi data dari BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk ke dalam klaster 1, atau Provinsi dengan IPM di bawah angka nasional di bawah/sedang.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh belanja pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) mengetahui pengaruh belanja kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (3) mengetahui pengaruh belanja

infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia selama pandemi Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis tentang pengaruh pengeluaran pemerintah pada fungsi belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada masa covid-19 di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pengeluaran pemerintah pada fungsi belanja pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi infrastruktur dan IPM pada 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni tahun 2018-2022. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel melalui Fixed Effect Model (FEM). Model data panel dengan *Fixed Effects Model* (FEM) mengasumsikan bahwa perbedaan mendasar antar individu dapat diakomodasikan melalui perbedaan intersepnya, namun intersep antarwaktu sama (*time invariant*) (Fatsabit, 2019). Pengujian hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis secara parsial (uji t), uji hipotesis secara simultan (uji f), dan analisis koefisien determinasi (R^2).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Tabel 1.1 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Prov. NTT Tahun 2020-2022

Kabupaten/Kota	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	62.91	63.56	63,53	63,83	64,43
Sumba Timur	64.65	65.34	65,52	65,74	66,17
Kupang	63.55	64.43	64,32	64,41	65,04
Timor Tengah Selatan	61.58	62.23	62,15	62,16	62,73
Timor Tengah Utara	62.65	63.34	63,53	63,69	64,26
Belu	61.86	62.54	62,68	62,77	63,22
Alor	60.14	61.03	61,33	61,37	62,26
Lembata	63.96	64.91	64,74	64,75	65,47
Flores Timur	63.55	64.34	64,22	64,22	64,93
Sikka	63.89	64.75	65,11	65,41	66,06
Ende	66.62	67.20	67,04	67,3	67,97
Ngada	67.10	67.76	67,88	67,88	68,26
Manggarai	63.32	64.15	64,54	65,01	65,83
Rote Ndao	61.51	62.22	62,39	62,6	63,21
Manggarai Barat	62.58	63.50	63,89	64,17	64,92
Sumba Tengah	60.07	61.01	61,53	61,8	62,71
Sumba Barat Daya	61.89	62.60	62,28	62,29	63,15
Nagekeo	65.35	65.88	65,81	65,82	66,22
Manggarai Timur	59.49	60.47	60,85	61,37	62,3
Sabu Raijua	55.79	56.66	57,02	57,03	57,9
Malaka	59.66	60.34	60,21	60,42	61,34
Kota Kupang	78.84	79.55	79,71	79,74	80,2
Nusa Tenggara Timur	64.39	65.23	65,19	65,28	65,9

sumber : Badan Pusat Statistik Prov. NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi Provinsi ketiga indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022. Dua diantaranya adalah Papua dan Papua Barat. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan melakukan berbagai inovasi kebijakan. Namun upaya tersebut masih belum berhasil karena indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terbelakang rendah. Sehingga pemerintah berupaya dengan mendanai Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur. Dengan harapan pemerintah bahwa dengan adanya pendanaan ini mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat kita lihat dari data belanja berikut:

Tabel 1. Belanja Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Prov. NTT Tahun 2018-2022

Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	142.920.901.343	164.207.953.418	Rp 473.030.435.125	Rp 151.639.702.837	Rp 160.654.626.965
Sumba Timur	279.689.467.594	291.061.838.607	Rp 805.917.692.619	Rp 279.420.955.043	Rp 288.616.420.340
Kupang	357.763.193.360	399.719.273.508	Rp 696.600.653.559	Rp 361.660.523.609	Rp 376.990.254.952
Timor Tengah Selatan	407.642.978.149	436.893.383.144	Rp 847.112.277.406	Rp 385.583.569.182	Rp 432.613.875.008
Timor Tengah Utara	270.162.375.058	284.474.987.985	Rp 753.889.366.424	Rp 302.523.405.159	Rp 283.013.235.614
Belu	225.792.620.344	238.563.697.950	Rp 630.476.765.723	Rp 236.970.963.338	Rp 249.498.798.427
Alor	245.395.152.266	239.194.802.221	Rp 789.428.985.285	Rp 211.732.326.222	Rp 256.547.608.406
Lembata	170.073.160.864	224.398.178.056	Rp 462.965.006.878	Rp 195.389.672.823	Rp 180.306.739.897
Flores Timur	276.346.054.602	288.344.182.107	Rp 698.467.657.649	Rp 308.811.771.828	Rp 334.367.717.675
Sikka	324.799.359.148	336.668.076.265	Rp 1.068.188.481.686	Rp 318.387.465.269	Rp 294.686.900.778
Ende	310.922.149.461	333.499.969.207	Rp 824.626.081.831	Rp 329.590.788.738	Rp 373.505.287.214
Ngada	93.499.723.463	105.243.520.681	Rp 480.126.271.427	Rp 218.802.243.107	Rp 256.293.013.627
Manggarai	293.772.412.886	311.664.020.769	Rp 807.521.086.314	Rp 319.192.744.587	Rp 427.206.259.278
Rote Ndao	181.572.670.184	200.164.332.000	Rp 397.122.459.781	Rp 216.747.065.580	Rp 226.035.226.606
Manggarai Barat	295.557.371.676	290.118.863.499	Rp 786.891.399.328	Rp 297.290.807.600	Rp 342.801.109.387
Sumba Tengah	125.192.788.578	140.786.052.526	Rp 398.335.121.066	Rp 132.114.562.143	Rp 161.087.087.619
Sumba Barat Daya	290.100.976.183	346.356.469.819	Rp 564.609.126.994	Rp 259.922.060.703	Rp 309.957.078.818
Nagekeo	186.077.214.500	190.223.200.000	Rp 524.629.645.798	Rp 204.695.430.968	Rp 218.488.793.526
Manggarai Timur	291.777.520.671	286.870.958.142	Rp 673.349.648.498	Rp 300.632.519.462	Rp 348.014.356.048
Sabu Raijua	110.297.907.730	148.072.164.048	Rp 376.019.743.777	Rp 141.648.151.657	Rp 160.109.822.294
Malaka	205.472.639.292	255.662.749.810	Rp 565.022.702.396	Rp 234.204.631.953	Rp 207.089.994.727
Kota Kupang	226.253.007.053	375.128.936.997	Rp 594.957.689.726	Rp 349.024.145.106	Rp 375.559.258.424
Total	5.311.081.644.405	5.887.317.610.759	Rp13.624.330.609.565	Rp 5.755.985.506.914	Rp 6.263.443.465.630

Sumber :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tabel 2. Belanja Kesehatan Pada Kabupaten/Kota Prov. NTT Tahun 2018-2022

Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Alor	229.261.115.911	199.680.928.765	Rp 266.109.756.036	Rp 285.707.741.504	Rp 219.603.423.995
Kab. Belu	206.533.996.024	206.138.866.881	Rp 211.219.282.394	Rp 175.059.867.885	Rp 237.581.126.444
Kab. Ende	174.292.818.600	240.909.820.219	Rp 262.524.935.659	Rp 233.144.140.789	Rp 316.753.257.616
Kab. Flores Timur	193.460.780.145	217.272.798.964	Rp 235.340.681.614	Rp 228.277.300.948	Rp 215.130.093.822
Kab. Kupang	224.640.249.669	158.423.585.743	Rp 202.482.496.290	Rp 239.603.827.991	Rp 233.450.611.780
Kab. Lembata	151.010.098.462	170.960.249.469	Rp 164.251.343.834	Rp 141.482.215.344	Rp 150.400.830.640
Kab. Manggarai	229.344.164.095	237.658.498.422	Rp 260.451.988.288	Rp 237.940.279.686	Rp 289.432.631.361
Kab. Ngada	71.112.109.419	81.096.933.940	Rp 92.331.914.966	Rp 165.542.929.537	Rp 197.968.237.064
Kab. Sikka	238.218.119.954	303.697.151.461	Rp 301.074.892.621	Rp 340.482.825.959	Rp 402.356.921.150
Kab. Sumba Barat	196.028.215.867	164.555.101.546	Rp 173.382.977.938	Rp 168.493.311.003	Rp 126.207.790.784
Kab. Sumba Timur	232.861.986.623	297.036.825.705	Rp 290.990.243.214	Rp 254.646.663.587	Rp 242.915.659.820
Kab. Timor Tengah Selatan	225.834.062.419	216.613.752.899	Rp 261.733.006.812	Rp 215.539.460.278	Rp 347.249.666.487
Kab. Timor Tengah Utara	155.613.770.702	234.452.598.731	Rp 207.497.924.284	Rp 178.297.665.420	Rp 291.335.300.577
Kota Kupang	45.216.630.911	195.051.309.193	Rp 178.893.787.348	Rp 204.849.873.603	Rp 173.732.541.445
Kab. Rote Ndao	123.008.444.013	103.671.221.794	Rp 115.914.224.639	Rp 133.525.040.167	Rp 136.788.614.275
Kab. Manggarai Barat	189.409.365.485	177.543.122.809	Rp 219.812.224.910	Rp 228.792.853.782	Rp 331.452.495.836
Kab. Nagekeo	96.460.632.000	170.629.023.000	Rp 179.781.418.515	Rp 145.942.536.611	Rp 153.097.598.215
Kab. Sumba Barat Daya	127.487.874.259	141.550.181.512	Rp 187.673.901.337	Rp 186.009.673.418	Rp 170.910.414.399
Kab. Sumba Tengah	102.865.855.137	93.349.320.193	Rp 122.301.199.387	Rp 122.126.484.506	Rp 131.030.538.613
Kab. Manggarai Timur	200.669.684.796	164.845.151.896	Rp 192.087.547.353	Rp 217.838.059.938	Rp 251.449.610.687
Kab. Sabu Raijua	89.910.216.951	100.795.460.445	Rp 153.903.116.250	Rp 117.681.405.616	Rp 100.493.932.911
Kab. Malaka	135.696.649.985	158.216.196.360	Rp 167.059.331.360	Rp 215.627.103.201	Rp 175.116.858.835
Total	3.638.936.841.427	4.034.148.099.947	Rp 4.446.818.197.070	Rp 4.436.611.262.794	Rp 4.894.458.158.778

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Tabel 3. Belanja Infrastruktur Pada Kabupaten/Kota Prov. NTT Tahun 2018-2022

Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Alor	15.493.476.000	118.522.556.028	Rp 111.998.600.004	Rp 75.940.941.219	Rp 18.008.063.750
Kab. Belu	22.008.045.729	119.672.257.356	Rp 150.786.664.549	Rp 112.760.831.600	Rp 6.616.489.000
Kab. Ende	26.655.670.100	115.936.793.636	Rp 97.903.795.525	Rp 10.618.843.496	Rp 12.203.747.767
Kab. Flores Timur	9.207.915.421	80.355.031.798	Rp 93.297.737.696	Rp 27.697.794.366	Rp 19.719.581.265
Kab. Kupang	33.380.540.900	163.496.048.300	Rp 122.097.710.700	Rp 28.277.525.673	Rp 21.063.717.498
Kab. Lembata	13.168.284.725	120.076.314.071	Rp 108.838.326.565	Rp 27.316.904.027	Rp 6.830.617.060
Kab. Manggarai	23.418.157.924	186.668.614.429	Rp 176.573.587.187	Rp 25.051.281.484	Rp 19.696.186.979
Kab. Ngada	5.438.677.475	135.215.421.570	Rp 154.745.113.524	Rp 53.148.274.611	Rp 24.283.189.860

Kab. Sikka	22.517.086.051	94.239.141.947	Rp 96.846.958.042	Rp 84.823.547.384	Rp 24.273.841.956
Kab. Sumba Barat	7.063.771.622	126.808.498.148	Rp 91.485.207.857	Rp 16.616.234.469	Rp 4.946.355.400
Kab. Sumba Timur	157.497.437.500	174.468.913.278	Rp 151.812.224.536	Rp 12.162.153.880	Rp 17.365.125.998
Kab. Timor Tengah Selatan	198.850.292.500	192.764.701.271	Rp 184.046.473.593	Rp 34.375.491.586	Rp 22.590.143.829
Kab. Timor Tengah Utara	151.618.642.731	187.455.022.932	Rp 201.257.720.323	Rp 113.155.220.273	Rp 76.758.476.143
Kota Kupang	8.503.416.100	111.988.658.453	Rp 150.214.009.181	Rp 27.591.021.382	Rp 37.481.487.330
Kab. Rote Ndao	74.987.550.000	100.559.997.600	Rp 95.470.087.975	Rp 46.810.809.930	Rp 10.894.580.700
Kab. Manggarai Barat	172.155.689.110	172.155.689.110	Rp 213.487.014.897	Rp 37.379.549.937	Rp 6.833.824.800
Kab. Nagekeo	93.775.205.098	118.994.443.000	Rp 130.580.751.094	Rp 33.814.169.619	Rp 45.808.092.457
Kab. Sumba Barat Daya	104.939.255.256	103.575.058.118	Rp 101.717.480.218	Rp 24.900.695.000	Rp 20.015.137.840
Kab. Sumba Tengah	97.479.767.000	90.714.140.358	Rp 94.112.676.078	Rp 35.942.509.500	Rp 22.876.898.560
Kab. Manggarai Timur	84.260.206.074	200.525.705.262	Rp 201.114.138.106	Rp 40.568.408.400	Rp 11.974.430.520
Kab. Sabu Raijua	145.522.314.837	142.177.786.525	Rp 140.963.809.739	Rp 10.544.925.129	Rp 3.941.289.000
Kab. Malaka	80.068.010.660	89.582.138.440	Rp 60.749.309.914	Rp 8.893.412.000	Rp 7.219.409.000
Total	1.548.009.412.814	2.945.952.931.630	Rp 2.930.099.399.323	Rp 888.390.546.986	Rp 441.400.688.734

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

3.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

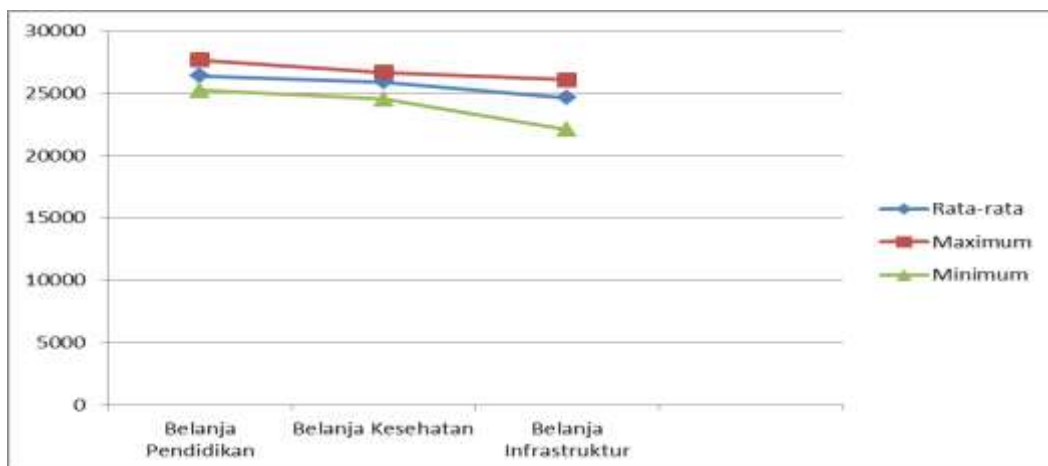
Analisis statistik deskriptif dilakukan pada sampel yang digunakan penelitian ini yaitu pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2020 sampaidengan 2022. Variabel dependenden dalam penelitian ini adalah Indeks Pemabangunan Manusia dan variabel independen yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur.

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata	Maximum	Minimum	Standar Dev.
Belanja Pendidikan	26433,90	27697,00	25261,00	5,059,246
Belanja Kesehatan	25938,74	26721,00	24535,00	3,623,482
Belanja Infrastruktur	24646,05	26087,00	22095,00	1,091,307

Sumber : Hasil Output E-views 9.

Grafik 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif



Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa pada tabel diatas, belanja pendidikan menunjukkan data maximum sebesar Rp 1.068.188.481.686 atau sebesar 27697,00 yang terdapat pada Kabupaten Sikka pada tahun 2020, sedangkan data minimum sebesar Rp 93.499.723.463 atau sebesar 25261,00 yang terdapat di Kabupaten Ngada pada tahun 2018 dan nilai rata-rata sebesar 264343,00 dengan standar deviasi sebesar 5,059. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasilnya baik. Karena standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat rendah. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasilnya normal.

Belanja kesehatan menunjukkan data maximum sebesar Rp 402.365.921.150 atau sebesar 26721,00 yang terdapat pada Kabupaten Sikka pada tahun 2022, sedangkan data minimum sebesar Rp 45.216.630.911 atau sebesar 24535,00 yang terdapat di Kota Kupang pada tahun 2018 dan nilai rata-rata sebesar 25939,00 dengan standar deviasi sebesar 3,623. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasilnya baik. Karena standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat rendah. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasilnya normal.

Belanja infrastruktur menunjukkan data maximum sebesar Rp 213.487.014.897 atau sebesar 26087,00 yang terdapat pada Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2020, sedangkan data minimum sebesar Rp 3.941.289.000 atau sebesar 22095,00 yang terdapat di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 dan nilai rata-rata sebesar 24646,00 dengan standar deviasi sebesar 1,091. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, sehingga mengindikasikan bahwa hasilnya baik. Karena standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat rendah. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasilnya normal.

3.1.2 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel Belanja Pendidikan (X1), Belanja Kesehatan (X2), dan Belanja Infrastruktur (X3) secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y).

Tabel 4. Hasil Uji Secara Parsial Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	t-Statistik	Signifikansi
C	3,7286530	3,504883	0.0000
X1	0.005913	2,412764	0.0180
X2	0.014554	3,507473	0.0007
X3	-0.004215	-4,61575	0.0000
R-square	0.984954		
F-statistic	2,318503		
Signifikansi (F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output E-views 9.

Hasil uji t dari tabel diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Pengaruh Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian regresi data panel melalui Fixed Effect Model pada tabel

menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung untuk variabel belanja pendidikan sebesar 2,412764, sementara t tabel dengan $\alpha = 0.05$ dan $df = (n-k-1) 110 - 3-1 = 106$ dimana memperoleh t tabel sebesar 1.982597, yang berarti bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,412764 > 1.982597$), yang kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0.0180 yang artinya lebih kecil dari 0.05. maka variabel belanja pendidikan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

b. Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian dari regresi data panel melalui Fixed Effect Model pada tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung untuk variabel belanja kesehatan sebesar 3,507473, sementara t tabel dengan $\alpha = 0.05$ dan $df = (n-k-1) 110 - 3-1 = 106$ dimana memperoleh t tabel sebesar 1.982597, yang artinya bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,507473 > 1.982597$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.0007 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Maka variabel belanja kesehatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

c. Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil pengujian dari regresi data panel melalui Fixed Effect Model pada tabel diatas menunjukkan hasil bahwa nilai t hitung untuk variabel belanja infrastruktur sebesar -4,61575 sementara t tabel dengan $\alpha = 0.05$ dan $df = (n-k-1) 110 - 3-1 = 106$ dimana memperoleh t tabel sebesar 1.982597, yang artinya bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-4,61575 < 1.982597$), kemudian jika dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang artinya lebih kecil dari 0.05. Maka variabel belanja infrastruktur secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Menurut Sugiyono (Maharani, 2020), uji F ini digunakan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Signifikansi berarti hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Kriteria pengujian hipotesis dalam uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) adalah sebagai berikut :

H_0 di terima jika $\text{prob}(F\text{-statistic}) > \alpha$, dimana $\alpha = 0,05$ artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

H_a diterima jika $\text{prob}(F\text{-statistic}) < \alpha$, dimana $\alpha = 0,05$ artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan dari variabel Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan Fixed Effect Model

Sumber : Hasil Output E-views 9.

Variabel	Coefficient	t-Statistik	Signifikansi
C	3.728.653	3.504.883	0.0000
X1	0.005913	2.412.764	0.0180
X2	0.014554	3.507.473	0.0007
X3	-0.004215	-4.615.749	0.0000
R-square	0.984954		
F-statistic	2.318.503		
Signifikansi (F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.18, nilai f hitung sebesar 2,318503 (F- statistic) sementara F tabel dengan tingkat $\alpha = 0,05$ adalah sebesar 2,690303 dengan demikian F hitung lebih kecil dari F tabel ($2,318503 > 2,690303$) kemudian jika dilihat dari nilai Prob.(F-statistic) sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya bahwa secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan dari variabel Belanja Pendidikan (X1), Belanja Kesehatan (X2), dan Belanja Infrastruktur (X3) terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 menunjukkan besarnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Infrastruktur. Besarnya nilai R^2 dapat dilihat dari adjusted R Square pada hasil Common Effect model berikut ini.

Tabel 6. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) Fixed Effect Model

Sumber : Hasil Output E-views 9.

Variabel	Coefficient	t-Statistik	Signifikansi
C	3.728.653	3.504.883	0.0000
X1	0.005913	2.412.764	0.0180
X2	0.014554	3.507.473	0.0007
X3	-0.004215	-4.615.749	0.0000
R-square	0.984954		
F-statistic	2.318.503		
Signifikansi (F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R-Squared sebesar 0,984954, artinya ada hubungan yang positif dan kuat antar variabel bebas Belanja Pendidikan (X1), Belanja Kesehatan (X2), dan Belanja Infrastruktur (X3) terhadap variabel terikat Indeks Pembangunan Manusia. Nilai adjusted R-Squared sebesar 0,984954 mengandung arti bahwa variasi dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 98,4%, sedangkan sisanya 1,6% ($100\% - 98,4\% = 1,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

3.2. Pembahasan

Tabel 7. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

Variabel	Hubungan	Signifikansi
Belanja Pendidikan	Berpengaruh	Positif & Signifikan
Belanja Kesehatan	Berpengaruh	Positif & Signifikan
Belanja Infrastruktur	Berpengaruh	Negatif & Signifikan

Sumber : Hasil Output E-views 9.

Berdasarkan pengujian melalui statistika menunjukkan bahwa variabel belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Belanja daerah yang dialokasi mempengaruhi perkembangan sektor pendidikan karena tidak hanya berfokus pada pengeluaran untuk kegiatan murid, guru, dan keperluan sekolah, namun juga

peningkatan belajar yang dapat mendorong meningkatnya jumlah murid mampu menyelesaikan sekolah sampai ketingkat lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat semakin mudah menerapkan dan mendapatkan hasil dari ilmu yang didapatkan untuk meningkatkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Hal ini dapat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sektor lainnya, karena dengan pendidikan yang berkualitas menjadi kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pengujian statistika menunjukkan bahwa variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memikirkan dan mengalokasikan pengeluaran belanja kesehatan pada tingkat yang pantas atau sesuai dengan amanat UU No.36 Tahun 2009, agar fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati segala golongan bukan hanya golongan atas saja melainkan juga untuk golongan bawah yang sudah sepatutnya sangat menjadi perhatian pemerintah. Ketika kesehatan masyarakat di perhatikan maka sangatlah mungkin tidak ada lagi masyarakat mengalami kekurangan Gizi. Masyarakat yang sakit dapat berobat walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Kesehatan merupakan hal penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, keadaan tubuh yang sehat masyarakat bisa belajar dan bekerja. Maka dengan meningkatnya kesehatan akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa menjalani hidup dengan sejahtera, dengan demikian dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Berdasarkan hasil pengujian statistik belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan, hal ini sejalan dengan teori karena jika dilihat dari teori bahwa belanja infrastruktur dipergunakan untuk pembangunan sarana prasarana publik dimana masyarakat dapat menggunakannya dalam menunjang perekonomian yang mana akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia. Namun pada Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak daerah yang belum berkembang dalam bidang pembangunan khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur seperti pada akses listrik dan air bersih dan jalan raya sebagai salah satu faktor utama penunjang perekonomian yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang tidak merata pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat kita lihat dari hasil pengujian yang menunjukkan hasil negatif, hal ini yang juga menjadi faktor utama tidak meningkatnya indeks pembangunan manusia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial belanja pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, secara parsial belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, secara parsial belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
2. Secara simultan belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.
3. Hasil uji koefisien determinan (R^2), nilai adjusted R-Squared sebesar 0,98495, artinya

sebesar 98,4 % belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja infrastruktur berpengaruh dalam menaikkan indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatsabit, M. I., & Yusran, H. L. (2019). Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 71-84.
- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lapian, A. L. C. P. (2021). Analisis pengaruh belanja daerah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 75-95.
- Izzah, C. I., & Hendarti, I. M. (2021). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, Dan Pdrb Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 2, 99-106.
- Janah, M. (2022). Analisis pengaruh tingkat pdrb perkapita, indeks pembangunan manusia, dan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di indonesia periode tahun 2019-2021. *Profit: jurnal manajemen, bisnis dan akuntansi*, 1(4), 23-43.
- Maharani, N. S. (2020). Pengaruh Promosi dan Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 57-78.
- Nalle, F. W. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 35-45.
- Negara, B. P., & Khoirunurrofik, K. (2021). Dampak desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pendapatan perkapita antar kabupaten/kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1-18.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212-222.
- Raharti, R., Sarnowo, H., & Aprillia, L. N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 6(1), 36-53.
- Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Deepublish.